



TFCA SUMATERA

HIGHLIGHT

Diterbitkan oleh:
Tropical Forest Conservation Action
for Sumatera

Administrator:
Yayasan Keanekaragaman Hayati Indonesia
Jl. Bangka VIII no. 3 B Pela Mampang Jakarta 12720



Program Hibah

Pendekatan baru pengelolaan program TFCA-Sumatera dilakukan dengan membentuk Fasilitator Wilayah (Faswil).

Galeri Mitra

Di Aceh, pengaduan kejahatan kehutanan dapat dilakukan oleh masyarakat dengan mengirimkan SMS kepada aparat setempat.

Suar

TFCA-Sumatera mengintensifkan sosialisasi program Database System Information (DESY) bagi para mitra di 3 wilayah.

Merumuskan Kembali Visi Pelestarian Hutan Sumatra

Para mitra Sumatera bersama para pemangku kepentingan menyusun kesepakatan pengelolaan bersama hutan Sumatera

Disadari bahwa pengelolaan hutan merupakan kerja kolektif dari berbagai pihak. Ada banyak kepentingan terhadap hutan. Oleh karena itu, sinkronisasi dan koordinasi diantara berbagai pihak mutlak diperlukan agar upaya pengelolaan bisa berjalan dengan saling menguatkan.

Dengan semangat untuk pengelolaan hutan Sumatra yang lebih baik, Vision Map Pengelolaan Hutan Sumatra diadakan di beberapa tempat yang menjadi simpul pengelolaan hutan yang

didanai oleh TFCA-Sumatera. Untuk Sumatera bagian utara, acara dipusatkan di Medan. Sedangkan untuk bagian tengah dan selatan, acara dipusatkan di Padang.

Strategi sharing visi bersama antar stakeholder dimulai dengan konsolidasi internal diantara mitra TFCA-Sumatera sendiri. Acara konsolidasi pertama di adakan di Muarabungo, Jambi yang dihadiri oleh para mitra yang bekerja di bentang alam Kerinci Seblat, Senepis-



Suasana diskusi mitra TFCA-Sumatera bagian Utara di Medan

Kampar-Kerumutan, Teso Nilo, Bukit Tiga Puluh, dan Mentawai. Acara konsolidasi kedua dilakukan di Medan dengan mengundang seluruh mitra yang berada di 4 bentang alam di Medan yaitu Seulawah-Ulumasen, Leuser, DAS Toba Barat, dan Batang Toru-Batang Gadis. Sedangkan acara konsolidasi ketiga diadakan di Lampung dengan melibatkan mitra yang berada di 3 bentang alam yaitu Way Kambas, Bukit Barisan Selatan, dan Berbak-Sembilang.



Para pembicara kunci workshop Visi Sumatera di Padang, Ki-ka: Heri Suhartoyo – Didi Wurdjanto - Erna Witoelar - Rendra Hertiadhi – Hendri Oktavia

Setelah konsolidasi dan perumusan tingkat internal dilaksanakan, koordinasi dengan para pemangku kepentingan dilakukan untuk menggali visi dari para pihak. Vision map pertama diadakan di Medan dengan melibatkan para pemangku kepentingan seperti BKSDA Aceh, BKSDA Sumatera Utara, Taman Nasional Batang Gadis, dan Balai Besar TN Leuser, pihak akademisi, maupun LSM calon mitra. Pemangku kepentingan mempresentasikan program kerja prioritas 2016-2019. Presentasi ini memberikan gambaran kepada mitra dan calon mitra untuk

kegiatan seperti apa yang dapat disenergikan dengan otoritas pengelola kawasan konservasi. Peserta lain kemudian memberi tanggapannya. Banyak yang menanggapi soal tata batas dan konflik batas taman nasional dengan masyarakat, penanganan satwa, persoalan koordinasi serta berbagai isu lainnya. Para mitra TFCA-Sumatra pun memaparkan programnya dengan presentasi yang tidak hanya mewakili lembaga namun memaparkan SWOT di tingkat bentang alam.

Vision Map kedua diadakan di Padang,

Sumatera Barat. Vision map dihadiri oleh mitra TFCA-Sumatera yang wilayah kerjanya ada di 8 bentang alam, pemerintah (pemda dan unsur kementerian lingkungan hidup dan kehutanan), serta pihak swasta. Suasana keterbukaan dan kebersamaan sangat terasa sekali, walau seringkali terdapat perdebatan namun diskusi dilakukan dengan sangat konstruktif dengan saling membagi informasi dan tawaran kerja sama. Menarik juga paparan yang disampaikan oleh pihak swasta yang diwakili oleh Rendra Hertiadhi dari PT. Arangan Hutani Lestari. Intinya swastapun berkepentingan agar pengelolaan hutan dilakukan dengan cara-cara yang tetap memelihara kesinambungan dan keseimbangan alam.

Ada banyak masukan dan gap komunikasi yang dijemput dari rangkaian acara ini. Masukan ini akan diolah dan didiskusikan bersama yang akan menjadi bagian dari visi pengelolaan program TFCA-Sumatera ke depan. Sebuah visi bersama untuk pengelolaan hutan agar tidak salah arah.



Peserta workshop konsolidasi mitra TFCA-Sumatera wilayah Selatan



Hamdan, Koordinator Faswil Utara dan M. Sutono
Koordinator Faswil Tengah dan Selatan

Fasilitator Wilayah TFCA- Sumatera

Enam tahun sudah Program TFCA-Sumatera berjalan. Selama kurun waktu tersebut makin banyak mitra yang ikut berkontribusi mengelola program.

Seiring dengan bertambahnya jumlah mitra, bertambah pula beban monitoring dan pengelolaan program yang diemban oleh KEHATI sebagai Administrator program. Tidak saja nilai hibahnya, tetapi juga pada banyaknya lembaga penerima hibah. Diawali dengan 5 mitra di siklus hibah pertama tahun 2011, kini sebanyak 34 mitra aktif yang tersebar ke seluruh wilayah Sumatera. Program-program mitra pun juga semakin banyak dan beragam. Dengan pertimbangan efektifitas dan efisiensi serta rentang kendali yang dijangkau, TFCA-Sumatera berinisiatif membentuk mitra khusus yang diberi nama Fasilitator Wilayah.

Fasilitator wilayah bertugas membantu Administrator program TFCA Sumatera, dalam melakukan fungsi monitor, evaluasi, peningkatan kapasitas mitra atau stakeholder serta menggalang kerjasama dengan para pihak dan mengelola pengetahuan program di 13 kawasan prioritas.

Mekanisme kerja fasilitator wilayah dibagi dalam 3 wilayah. Wilayah utara yang mengkoordinasikan bentang alam Seulawah-Ulumasen, Kawasan ekosistem Lesuser, Toba Barat, Angkola, Batang Gadis dan Batang Toru yang berkedudukan di Medan. Wilayah tengah yang mengkoordinasikan bentang alam Semenanjung Siak Kampar, Taman Nasional (TN) Tesso Nilo, TN Bukit Tigapuluh, TN Kerinci Seblat, Siberut-Mentawai, Berbak dan Sembilang berkedudukan di Jambi. Sedangkan Regional Selatan yang mengkoordinasikan bentang alam TN Bukit Barisan Selatan, TN Way Kambas dan sama-sama berkedudukan di Jambi. Fasilitator Wilayah bagian utara adalah LCP (Leuser Conservation Partnership) dengan Hamdan yang bertugas sebagai koordinator. Sedangkan SSS-Pundi Sumatera (Sumatera Sustainable Support-Pundi Sumatera) menjadi lembaga yang menjadi fasilitator wilayah untuk kawasan tengah dan selatan Sumatra, dengan M. Sutono yang menjadi koordinatornya.

Dalam implementasinya, fasilitator wilayah merupakan subkordinasi dari fungsi-fungsi yang berada di dalam Administrator TFCA Sumatera, seperti program hibah, komunikasi - informasi dan monev (monitoring dan evaluasi). Khusus manajemen keuangan sendiri ditangani langsung oleh Administrator TFCA Sumatera.

Harapannya dengan adanya fasilitator wilayah ini dapat mengefektifkan sistem kerja TFCA Sumatera, memperlancar sistem komunikasi dan informasi, serta membantu tercapainya tujuan, visi dan misi TFCA Sumatera.



Faswil diharapkan dapat membantu efektifitas pengelolaan program dan menjembatani kepentingan para pihak.

-Samedi



Kejahatan kehutanan bukanlah kejahatan yang biasa. Ada hal-hal yang kasat mata dan ada pula kejahatan yang melibatkan mafia. Tidak mudah untuk menjerat pelaku kejahatannya. Jangankan menjerat, melaporkan pun sulit, selain karena pelapor menguatirkan keselamatannya, lokasi medan yang seringkali terpencilpun menyulitkan pelaporan bila harus menempuh jalur formal prosedural.

Hal ini coba diatasi oleh mitra Lembaga Suar Galang Keadilan di Aceh. Melalui forum Gakkumdu (Penegakan Hukum Terpadu) yang terdiri dari Polda Aceh, berbagai dinas di lingkungan pemerintah daerah Aceh, kejaksaan tinggi dan pengadilan tinggi Aceh telah beberapa kali melakukan pertemuan rutin. Wadah bersama ini sebagai sarana diskusi untuk pemutakhiran dan pertukaran informasi serta pengetahuan antar pihak, khususnya dengan pihak kejaksaan maupun dengan dinas-dinas terkait lainnya yang memiliki anggota dengan fungsi sebagai PPNS. Tahun 2015, melalui skema pendanaan TFCA-Sumatera, Lembaga Suar Galang Keadilan (LSGK) melanjutkan dukungan terhadap kegiatan tersebut, semata demi mendukung terciptanya keterpaduan kerjasama para pihak yang bertanggung jawab pada proses penegakan hukum di wilayah

Aceh.

Melalui forum tersebut kemudian muncul ide kerjasama penegakan hukum untuk kasus kejahatan terhadap satwa dan tumbuhan dilindungi antara Balai Konservasi Sumberdaya Alam (BKSDA) Aceh dan Polisi Daerah Aceh. BKSDA Aceh, yang diwakili oleh kepalanya, Genman Hasibuan, S.Hut, MM., dan POLDA Aceh oleh Direktur Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Aceh, Kombes Pol. Drs. Joko Irwanto, M, Si., sepakat untuk menandatangani Nota Kesepahaman Standard Operating Procedure (SOP) tentang Penanganan Awal Terpadu Tindak Pidana Terhadap Tumbuhan Dan Satwa Liar yang Dilindungi di Aceh. Kegiatan tersebut berlangsung di Hotel Grand Aceh, Banda Aceh pada tanggal 26 Januari 2016.

Sebelumnya, penyusunan Nota Kesepahaman Bersama dan SOP tersebut telah mulai digarap oleh Tim Pokja sejak Oktober 2015 dan draft finalnya baru selesai pada 18 Januari 2016. Tim Pokja ini terdiri dari penyidik Ditreskrimsus Polda Aceh, Direktorat Bidang Hukum Polda Aceh, Direktorat Binmas Polda Aceh, PPNS (Petugas Pegawai Negeri Sipil) dan tenaga ahli BKSDA Aceh, FFI Banda Aceh, Lembaga Suar Galang Keadilan, LBH Banda Aceh dan ACCI (Aceh Climate Change Initiative).

(Continued)

Terbitnya Nota Kesepahaman/SOP ini menjadi kekuatan bersama yang harus ditindaklanjuti guna timbulnya preseden yang baik demi ditegakannya keadilan dan kepastian hukum dalam perlindungan tumbuhan dan satwa. Kebermanfaatan lainnya untuk tetap menjaga kelestarian tumbuhan dan satwa di alam liarnya.

Pengaduan Tindak Kejahatan Lingkungan dan Kehutanan melalui SMS

Upaya pelestarian dan perlindungan hutan serta tumbuhan dan satwa liar di dalamnya tentu tidak bisa dipasrahkan kepada pemerintah saja. Namun, juga diperlukan peran dan partisipasi aktif masyarakat atau Lembaga Swadaya Masyarakat lain. Semua perlu iku 'cawe-cawe' untuk optimalisasi upaya pelestarian dan perlindungan hutan beserta tumbuhan dan satwa di dalamnya.

Berangkat dari hal tersebut, Lembaga Suar Galang Keadilan (LSGK) sebagai mitra TFCA-Sumatera dalam proyek "Penguatan Kapasitas Penegak Hukum dalam Pengawasan Kapasitas Penegak Hukum dalam Penanganan Kejahatan Terhadap Satwa Liar yang Dilindungi di Aceh" mendukung Polda Aceh sebagai aparat penegak hukum untuk meningkatkan kinerja penegakkan hukum lingkungan.

Kecepatan arus informasi/laporan dipandang mampu menjadi satu kunci keberhasilan dalam merespon dan mengidentifikasi pelanggaran di lapangan secara cepat. Dipilihlah Sistem Pelaporan berbasis SMS. Hal ini didasarkan pada pemikiran bahwa saat ini hampir semua individu telah memiliki telepon selular (handphone). SMS (Short Messaging Service) merupakan salah satu fitur pada handphone yang umum digunakan oleh pengguna (user), baik untuk mengirim,

maupun untuk menerima berita. Selain harganya terjangkau, keunggulan lain SMS adalah sifatnya yang real time (pada saat itu juga). Informasi pelapor dijamin kerahasiaannya, dimana nama pelapor tidak diminta menjadi syarat dalam menyampaikan laporan.

Peluncuran Fasilitas Pelaporan SMS ini sekaligus sebagai bentuk Sosialisasi kepada masyarakat luas di Aceh terkait dengan semangat peningkatan pelayanan Polda Aceh sehingga mampu memperkaya data dan informasi awal bagi Ditreskrimsus dan Direktorat Pembinaan Masyarakat (Ditbinmas) Polda Aceh, untuk menganalisa dan menentukan trend kejahatan di bidang Sumber Daya Alam dan melakukan langkah-langkah lebih lanjut yang dipandang perlu.

Pelaporan SMS ini tidak saja untuk memfasilitasi pelaporan kejahatan terhadap tumbuhan dan satwa, tetapi juga kejahatan lingkungan secara umum seperti kasus : kejahatan kehutanan, pertambangan, minyak bumi dan gas, illegal fishing, perkebunan (perijinan, pembakaran lahan dan hutan), dan konflik satwa. Bagi masyarakat yang mengetahui terjadinya tindak pidana lingkungan dapat melaporkan ke nomor 0811-677-1010 (pelapor akan dirahasiakan identitasnya dan tidak diminta menjadi saksi kasus). Cara melaporkannya mudah, sms dengan format NAMA POLSEK_NAMA GAMPONG_ISI PESAN dan kirim ke Cara melaporkannya mudah, sms dengan format NAMA POLSEK_NAMA GAMPONG_ISI PESAN dan kirim ke 0811-677-1010.

Tantangan selanjutnya setelah fasilitas ini disediakan adalah sosialisasi kepada masyarakat. Pengumuman dan spanduk tidak hanya dipasang di kantor-kantor aparat penegak hukum, namun juga

SMS CENTER 0811 677 1010
SUBDIT IV TIPIDTER DITRESKRIMSUS POLDA ACEH

KASUS

KEJAHATAN KEHUTANAN	1 #
PERTAMBANGAN	2 #
MINYAK BUMI DAN GAS	3 #
LINGKUNGAN HIDUP	4 #
PERIKANAN ILEGAL/LEGAL FISHING	5 #
PERKEBUNAN (PERIJINAN, PEMBAKARAN LAHAN & HUTAN)	6 #
KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM (KSDA) & KONFLIK SATWA	7 #

Format SMS: NAMA POLSEK, NAMA GAMPONG, ISI PESAN
Polsek Jaya, Gp. Baroh, Banyak kendaraan membawa kayu dari hutan, mohon diperhatikan
Kirim ke 08116771010

Contoh SMS Kejahatan Kehutanan

STOP!
Pelanggaran & Tindak Pidana
Kejahatan Lingkungan Hidup dan Kehutanan

diperluas hingga ke kantor camat, desa, sekolah, meunasah, mauun fasilitas publik lainnya. Namun yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana pihak yang berwenang menindaklanjuti setiap laporan yang masuk.



Menopang Terciptanya Pembangunan Berkelanjutan di Sumatra

Pulau Sumatera merupakan salah satu kawasan prioritas konservasi keanekaragaman hayati Paparan Sunda dan salah satu dari 34 wilayah di dunia yang memiliki tingkat keanekaragaman hayati dengan endemisme luar biasa. Tekanan terhadap pulau yang juga dijuluki swarnadwipa ini juga tak kalah hebatnya hingga menyebabkan hilangnya keanekaragaman hayati yang sangat tinggi pula.

Upaya perlindungan atau penyelamatan keanekaragaman hayati di Indonesia, termasuk di Sumatera, bukanlah hal yang baru. Pemerintah telah mengalokasikan dana dan tenaga yang tidak sedikit untuk pengelolaan kawasan konservasi, termasuk sebagian diantaranya berasal dari dana bantuan internasional, baik melalui kerjasama bilateral maupun multi-lateral serta dari lembaga-lembaga organisasi non-pemerintah baik nasional maupun internasional.

Berdasarkan data Departemen Kehutanan (2008), periode 2003-2006 kerusakan hutan dan deforestasi di dalam kawasan hutan Pulau Sumatera adalah yang terbesar dibandingkan dengan pulau-pulau besar lainnya, yaitu seluas 268.000 ha per tahun. Pulau Sumatera menyumbang sebesar 22,8 % terhadap deforestasi total di Indonesia (1,17 juta ha per tahun).

Hutan primer Sumatera yang masih tersisa hanya sekitar 29%, padahal Sumatera membutuhkan tutupan hutan sekurang-kurangnya 40% untuk tetap dapat menyangga kehidupan dan melindungi pusat konsentrasi keanekaragaman hayati penting Pulau Sumatera. Sebagian besar hutan primer yang tersisa terletak di dalam kawasan konservasi dan/atau kawasan lindung yang berada di dataran tinggi dan relatif lebih rendah keanekaragaman hayatinya dibanding dataran rendah.

Dengan menetapkan konservasi setidaknya 1 juta ha lahan hutan pada akhir periode Rencana Strategis pertama (2010-2015), TFCA-Sumatera telah mendukung 22 proyek dari 4 siklus hibah dengan total komitmen pendanaan mencapai Rp. 109.38 milyar yang berjalan di 12 dari 13 bentang alam prioritas. Lebih jauh lagi, TFCA-Sumatera berhasil memenuhi objektif awal dengan capaian yang tercatat di bidang pengembangan kebijakan dan institusi, restorasi dan tata kelola bentang alam, konservasi spesies, pelibatan para pemangku kepentingan, dan kegiatan lain yang sejalan dengan prinsip ekonomi hijau dan pembangunan berkelanjutan. Implementasi program juga telah memberikan TFCA-Sumatera pembelajaran yang berharga yang dijadikan masukan bagi perbaikan arahan program dan pengelolaan

untuk 5 tahun ke depan

Pada bulan September 2014, Pemerintah Amerika Serikat dan Pemerintah Indonesia sepakat untuk memperbesar program TFCA-Sumatera dengan menambahkan pendanaan di atas dana yang telah ada saat ini. Dana tambahan tersebut difokuskan untuk upaya konservasi 2 spesies kunci terancam punah, yaitu Harimau Sumatra dan Badak Sumatra. Perlindungan satwa ini diharapkan berdampak pada perlindungan dua satwa kunci lainnya yaitu Orangutan dan Gajah Sumatra karena di alam seringkali habitat mereka berada di kawasan yang sama.

Dalam rencana pengelolaan program 2015-2020, teridentifikasi 4 pembelajaran isu kunci yang harus diatasi oleh TFCA-Sumatera dan mitra penerima hibah di periode 5 tahun ke depan. Isu tersebut berkaitan dengan: **(1). Institusi dan kebijakan.** Kebijakan dan praktik pemerintahan yang kurang tepat akan berpotensi menambah permasalahan di tingkat bentang lama. Oleh karena itu, tumpang tindih kebijakan dan kelemahan institusi, termasuk kurangnya keterlibatan pemerintah lokal dan perusahaan dalam aksi konservasi adalah isu di dalam kerangka institusi dan kebijakan yang harus diatasi oleh TFCA-Sumatera.

(2) Konservasi dan perlindungan bentang alam.

Bentang alam merupakan isu sentral dalam konservasi karena menjadi tempat bagi sekaligus terdampak oleh aktivitas manusia. Pulau Sumatera mengalami deforestasi besar-besaran, degradasi hutan dari aktivitas manusia berupa penggunaan lahan yang tidak berkelanjutan.

(3) Konservasi dan perlindungan spesies terancam punah.

Analisis untuk sebagian besar penurunan populasi spesies terancam punah dihubungkan dengan kehilangan habitat dan perdagangan ilegal (termasuk perburuan). Oleh karena itu, isu spesies sangat erat kaitannya dengan isu degradasi lanskap. Perdagangan ilegal dan kejahatan terhadap hidupan liar juga diindikasikan memiliki kontribusi yang signifikan terhadap penurunan populasi.

(4) Pengembangan masyarakat lokal.

Keberhasilan konservasi di Sumatera sangat bergantung kepada keterlibatan masyarakat lokal. Kemiskinan dan rendahnya tingkat pendidikan seringkali dikambinghitamkan sebagai faktor yang mendorong degradasi hutan dan perburuan liar.

Aksi intervensi yang akan diambil untuk menangani keempat isu diatas akan dilakukan di 3 tataran, yaitu: di 1) Level institusi dan kebijakan; 2) Level bentang alam (termasuk hutan, habitat dan populasi); dan 3) Level masyarakat.

Pada tingkat bentang alam, fragmentasi dan hilangnya area hutan merupakan tantangan konservasi terbesar yang dihadapi di Sumatera. Berkurangnya populasi spesies bisa dikaitkan dengan hal ini. Konversi hutan, khususnya untuk perkebunan kelapa sawit, adalah faktor terbesar yang menyebabkan penggundulan hutan dan menjadi ancaman terbesar

bagi konservasi keanekaragaman hayati di Indonesia. Perkebunan kelapa sawit di Indonesia sebagian besar terkonsentrasi di Sumatera, berhubung perkembangannya sudah dimulai sejak zaman penjajahan Belanda. Karena sejarahnya yang panjang ini, perkembangan perkebunan kelapa sawit di Sumatera dan infrastruktur yang mendukungnya sudah lebih maju daripada di daerah-daerah lain di Indonesia. Selama sepuluh tahun terakhir, industri kelapa sawit sudah sangat berkembang dan sudah tumbuh dua kali lipat dari 4,2 juta ha di tahun 2000 menjadi 8 juta ha di tahun 2010. Distribusi geografis perkebunan kelapa sawit di Indonesia menunjukkan bahwa 66% perkebunan kelapa sawit berlokasi di Sumatera, 30% di Kalimantan, 3% di Sulawesi, dan sisanya tersebar di daerah-daerah lain di Indonesia, termasuk Jawa dan Papua.

Tantangan lain bagi konservasi di level bentang alam adalah kurangnya data. Data, terutama data populasi spesies, penggundulan hutan, dan kondisi habitat kebanyakan tidak lengkap atau janggal. Ini bisa menghalangi pencapaian target dalam proses konservasi.

Sebagian dari dana TFCA-Sumatera yang telah ada tersedia pula untuk mendukung konservasi dari spesies yang terancam punah, terutama badak, harimau, gajah dan orangutan yang terancam akibat kerusakan habitat dan perburuan ilegal di Sumatra. Spesies tersebut menjadi prioritas utama untuk tujuan konservasi. Tindakan-tindakan konservasi spesies dalam konteks pengembangan ini terdiri dari aktifitas yang terintegrasi, dengan perlindungan satwa liar sebagai tujuan utama; bersandingan dengan perlindungan bentang alam, peningkatan tata kelola dan kesejahteraan masyarakat untuk

penghidupan yang layak sebagai *sine qua non* untuk meraih tujuan tersebut.

Dalam implementasi program TFCA, ada beberapa tantangan dalam tingkat masyarakat yang sebaiknya diperhatikan oleh penerima dana. Hubungan dengan masyarakat dalam hal konservasi biasanya dibangun melalui pengembangan masyarakat atau peningkatan taraf hidup dengan mengembangkan ekonomi dan bisnis daerah. Ada banyak usulan untuk pengembangan masyarakat dan komersialisasi produk lokal. Meskipun begitu, kebanyakan dari penerima dana non-pemerintah tidak memiliki pengetahuan yang cukup mengenai bisnis sosial dan kewirausahaan. Di samping masalah-masalah teknis, banyak yang memerlukan pengembangan kemampuan dalam bisnis dan kewirausahaan lokal yang padat karya. Lebih jauh lagi, partisipasi yang rendah dalam konservasi oleh pemerintah daerah juga bisa banyak ditemui di lokasi-lokasi TFCA.

Suatu pendekatan baru diterapkan program TFCA-Sumatera dengan menempatkan fasilitator wilayah di 3 simpul Sumatra, bagian utara, tengah dan selatan. Diharapkan para fasilitator wilayah mampu membantu menjembatani kesulitan komunikasi yang banyak terjadi di antara pihak swasta dan institusi non-pemerintah. Melalui fasilitator regional ini, diharapkan terjalin kolaborasi yang lebih baik dengan pihak swasta maupun dengan institusi non-pemerintah lain.

Diharapkan kelestarian hutan Sumatra tetap terjaga yang dapat menopang berbagai keanekaragaman hayati yang ada didalamnya. Masyarakat yang berkepentingan langsung dengan hutan pun dapat hidup dengan sejahtera dalam bingkai dinamika sosial budaya dan pembangunan ekonomi wilayah yang terselenggara secara bertanggung gugat.



Hibah untuk Kelangsungan Spesies Karismatik Sumatra

Pada bulan Februari 2016, TFCA-Sumatera membuka kesempatan pendanaan hibah untuk pelestarian satwa liar terancam punah Sumatera serta program-program yang mendukung pemulihan dan peningkatan jumlah populasi. Pendanaan terkait satwa ini dikhususkan untuk mendanai 4 spesies karismatik Sumatra, yaitu Badak (*Dicerorhinus sumatrensis*), Harimau (*Panthera tigris sumatrae*), Orangutan (*Pongo abelii*), dan Gajah (*Elephas maximus sumatranus*).

Saat ini data mengenai jumlah populasi keempat spesies karismatik tersebut belum dapat divalidasi dengan baik. Data lama masih dipakai dan sifatnya masih berupa estimasi dan sporadis. Namun demikian, penurunan populasi merupakan hal yang kasat mata terjadi, dengan adanya berbagai laporan yang menyebutkan gajah mati, perburuan harimau, pembantaian orang utan, menciutnya habitat badak, perdagangan ilegal dan lain sebagainya.

Dari berbagai hasil diskusi dengan para pengamat dan pelaku konservasi satwa di Indonesia, diharapkan terjadi suatu kondisi yang dapat memastikan keberlanjutan hidupan satwa liar di Indonesia. Luaran yang ingin dicapai antara lain:

- Peningkatan minimal 5% populasi spesies terancam punah (badak, harimau, orangutan, dan gajah) Sumatra di 12 bentang alam prioritas di Sumatra yang merupakan habitat terancam punah;

- Terlindunginya minimal 800.000 ha habitat spesies terancam punah di ke 12 bentang alam prioritas;
- Adanya minimal 3 kegiatan konservasi populasi spesies target ke dalam rencana kerja UPT/UPTD/ Pemda / Swasta di mana program dilaksanakan.
- Tersusunnya 4 Strategi Rencana dan Aksi Konservasi Spesies (tingkat nasional) untuk Badak Sumatra, Harimau Sumatra, Orangutan Sumatra, dan Gajah Sumatra.
- Terbangun dan beroperasinya minimal 2 laboratorium / program studi di bidang konservasi satwa liar dengan akreditasi B.

TFCA-Sumatera mendukung kebutuhan tersebut dengan menyediakan skema hibah dengan pagu anggaran tidak melebihi USD 3 juta dengan maksimum periode kegiatan selama 5 tahun.

Undangan pembuatan proposal ini dilayangkan pada LSM/KSM serta Perguruan Tinggi yang diharapkan dapat bersinergi membentuk konsorsium. Pemerintah dan perusahaan swasta pun dapat terlibat, namun hibah tidak dapat diberikan secara langsung kepada kedua kategori ini, melainkan sebagai anggota konsorsium.

Proposal yang diajukan diharapkan dapat memberikan respon segera atas permasalahan yang ada di lapangan sekaligus memberikan dampak yang signifikan dengan pendekatan multi aspek.

